



**PENDAPATAN DAN HUBUNGAN PRODUKSI PEMANENAN HUTAN RAKYAT DI
KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG**
(Revenue and Production Relationship of People Forest Harvesting in Donri Donri Subregency,
Soppeng Regency)

Ardianty Abbas¹⁾, A.Mujetahid²⁾, Muhammad Dassir²⁾

¹⁾ Mahasiswa, Laboratorium Pemanenan dan Pengembangan Wilayah Pemanenan Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar,

²⁾ Staf Pengajar (Dosen), Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Email: ardiantyabbas@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the patterns of people forest harvesting, to know the entrepreneurs income on various harvesting pattern and to know the production relationship happened in people forest harvesting. The use of this research is the information about the income influence of various patterns to the production relationship of people forest harvesting. This reseach held on May until June, 2013 in Donri-Donri Subregency, Soppeng Regency. Primary data obtained by observation and interview in the field. Data analysis done by descriptive to describe the relations of production about social relation's production, the characteristic of relation production, and the structure of relation production. The quantitative analysis conducted by counting the revenue from each actors of harvesting. The result of this research obtained the the harvesting pattern of people forest accured in Donri-Donri Subregency. The entrepreneurs buy the wood by sortimen, by the tree and as a gatherer marketer. The biggest revenue of the entrepreneurs is buy the wood by tree. Production method held is komersialis, capitalist and subsistence production.

Keywords: Harvesting patterns, revenue, production relationship

PENDAHULUAN

Hubungan antar manusia dalam suatu proses produksi disebut sebagai hubungan sosial produksi, dimana dalam sebuah proses produksi terkadang masyarakatnya bukan hanya bersifat kerja sama namun ada juga yang bersifat hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini tergantung dari siapa yang memiliki atau menguasai seluruh alat-alat produksi (alat-alat kerja dan objek kerja). Dengan adanya hubungan sosial produksi dan alat-alat produksi serta adanya tenaga kerja inilah kemudian terbentuk suatu cara untuk melakukan proses produksi dalam suatu masyarakat. Namun seiring dengan waktu, perkembangan tenaga produktif dalam

suatu masyarakat akhirnya mendorong terjadinya perubahan dalam hubungan produksi dan menuntut adanya hubungan produksi baru. Inilah hukum dasar sejarah masyarakat dan merupakan sumber utama dari semua perubahan sosial yang ada (Barkah, 2002).

Hubungan produksi adalah hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi, yakni struktur pengorganisasian sosial produksi, seperti hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Hubungan-hubungan produksi tersebut bukan hanya ditentukan oleh perkembangan kekuatan produksi dan struktur kelas yang tercipta dalam masyarakat, melainkan juga oleh

tuntutan efisiensi produksi perusahaan hutan rakyat (Suseno, 1999).

Pemanenan hutan rakyat dilakukan oleh pemilik hutan rakyat dan pengusaha pemanenan kayu, dimana kegiatan pemanenan kayu pada hutan rakyat meliputi penebangan, pembagian batang, penyaradan dan pengangkutan. Pemilik kayu yang sekaligus sebagai pemilik modal menggunakan tenaga kerja dari keluarganya sendiri dan juga dari masyarakat luar di desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur hubungan produksi yang terjadi adalah *pseudo hirarkis* dan *non hirarkis*, sedangkan sifat hubungan produksi yang ada adalah hubungan produksi yang bersifat eksploitatif dan non eksploitatif (Sumule, 2011).

Permasalahan yang kerap kali muncul adalah adanya hubungan yang kurang menguntungkan dalam kegiatan pemanenan hutan yang dirasakan oleh pihak tenaga kerja pemanenan dan penyaradan dimana pembagian kerja dan sistem upahnya ditentukan oleh pelaku pengusaha kayu dan industri pengolahan kayu. Hal ini dikarenakan oleh posisinya yang sangat tidak menguntungkan dimana para pelaku usaha memegang kendali besar terhadap kegiatan pemanenan hutan.

Dengan demikian seharusnya hubungan produksi dalam pengembangan usaha kayu rakyat merupakan usaha untuk memberdayakan dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja pemanenan dan penyaradan sekaligus mewujudkan kelestarian usaha dan sumberdaya kayu rakyat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai hubungan produksi diantaranya struktur hubungan produksi, sifat hubungan produksi, dan batas sosial hubungan produksi yang terjadi di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pemanenan hutan

rakyat, mengetahui pendapatan pengusaha pada berbagai pola hubungan produksi pemanenan, dan mengetahui hubungan produksi yang terjadi dalam pemanenan hutan rakyat. Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi mengenai pengaruh pendapatan pada berbagai pola terhadap hubungan produksi pemanenan hutan rakyat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi: Pola pemanenan hutan rakyat, alat produksi pemanenan hutan rakyat, batas sosial hubungan produksi, sifat hubungan produksi, struktur hubungan produksi, biaya pemanenan dan penerimaan pelaku pemanenan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan laporan yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan hubungan produksi menyangkut batas sosial hubungan produksi, sifat hubungan produksi dan struktur hubungan produksi. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung penerimaan dari setiap pelaku pemanenan hutan rakyat dengan rumus :

$$P = P_o \cdot Q$$

Dimana,

P = Penerimaan pelaku pemanenan (Rp/m³)

P_o = Nilai sortimen atau upah kerja (Rp/m³)

Q = Jumlah sortimen yang dipanen (m³)

Menghitung penerimaan bersih dari setiap pelaku pemanenan hutan rakyat dengan rumus :

$$\Pi = P - B$$

Dimana,

Π = Penerimaan bersih (Rp/m³)

P = Penerimaan (Rp)
 B = Biaya Total (Rp/m³)

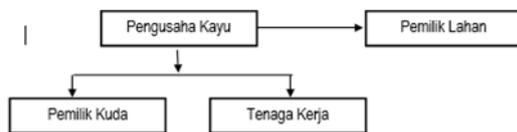
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pemanenan Hutan Rakyat

a. Pengusaha Membeli Kayu per Sortimen kepada Pemilik Hutan Rakyat

Pola pertama menggambarkan hubungan antara pengusaha kayu, pemilik lahan, pemilik kuda dan tenaga kerja. Pengusaha kayu membeli lahan dari pemilik lahan dalam bentuk sortimen dan juga mengeluarkan biaya sarad menggunakan kuda, upah tenaga kerja, biaya-biaya administrasi seperti surat keterangan dari desa maupun dari Dinas Kehutanan, biaya perjalanan dan biaya angkutan. Sedangkan pemilik lahan hanya mendapatkan hasil bersih dari pengusaha kayu setelah kayu tersebut diukur.

Hasil analisis data memberikan gambaran pola kegiatan pemanenan hutan rakyat yang dapat dilihat pada Gambar 1.



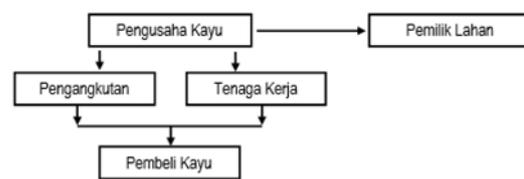
Gambar 1. Pola 1 Kegiatan Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

b. Pengusaha Membeli Kayu per Pohon kepada Pemilik Hutan Rakyat

Pada pola ini kegiatan pemanenan dilakukan oleh pengusaha kayu sedangkan pemilik lahan hanya akan menerima hasil penjualan kayu dari lahan yang dijual kepada pengusaha. Sistem pembelian kayu berdasarkan jumlah pohon yang terdapat pada satu lahan dan harga beli kayu ditentukan berdasarkan jenis kayu dan besar diameter kayu. Tenaga kerja pada kegiatan pemanenan kayu hutan rakyat berasal dari dalam lingkungan keluarga

yaitu sanak saudara dari pengusaha kayu. Alat penebangan dan bagi batang, dalam hal ini chainsaw yang digunakan merupakan milik dari pengusaha kayu sendiri, begitu pula dengan alat pengangkutannya, karena pengusaha kayu memiliki cukup modal untuk membeli chainsaw dan truk.

Hasil analisis data memberikan gambaran dari pola kegiatan pemanenan hutan rakyat yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pola 2 Kegiatan Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Pola kedua menggambarkan hubungan antara pengusaha kayu, pemilik lahan dan tenaga kerja. Pada pola ini pengusaha kayu yang mencari tenaga kerja pemanenan seperti penebangan, pembagian batang, penyaradan dan pengangkutan, membayar upah tenaga kerja, dan menanggung biaya penyaradan dan pengangkutan serta biaya administrasi.

c. Pengusaha sebagai Pedagang Pengumpul

Hasil analisis data memberikan gambaran dari pola kegiatan pemanenan hutan rakyat yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pola 3 Kegiatan Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Pola ketiga menggambarkan hubungan antara pengusaha, pemilik lahan, tenaga kerja, dan pemilik chainsaw dimana pengusaha berperan sebagai pedagang pengumpul yang membeli kayu dari rumah-rumah masyarakat. Berbeda dengan pola-pola sebelumnya yang menitikberatkan kegiatan pemanenan pada

pengusaha kayu, kegiatan pemanenan pada pola ini dilakukan sendiri oleh pemilik lahan mulai dari penebangan, penyaradan, hingga pengangkutan.

Perbandingan dari keseluruhan pola pemanenan hutan rakyat dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1. Pola Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan donri-Donri Kabupaten Soppeng

No	Pelaku Pemanenan	Pola I	Pola II	Pola III
1	Pemilik Lahan	Menjual kayu kepada pengusaha dengan harga per sortimen	Menjual kayu kepada pengusaha dengan harga per pohon	Mengusahakan sendiri lahannya dan menunggu pedagang pengumpul membeli kayu
2	Penebang	Dicari dan digaji oleh pengusaha kayu	Dicari dan digaji oleh pengusaha kayu	Penebangan dilakukan sendiri oleh pemilik lahan
3	Penyarad	Dicari dan digaji oleh pengusaha kayu	Dicari dan digaji oleh pengusaha kayu	Penebangan dilakukan sendiri oleh pemilik lahan
4	Pengangkutan	Ditanggung oleh pengusaha kayu	Ditanggung oleh pengusaha kayu	Ditanggung oleh pengusaha kayu sebagai pedagang pengumpul

2. Penerimaan Pelaku Pemanenan Hutan Rakyat

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengusaha dengan pola kedua memperoleh penerimaan yang paling besar bila dibandingkan dengan pengusaha pertama dan pengusaha ketiga sebesar

Rp 2.162.576/m³. Hal ini terjadi karena pengusaha kedua menjual kayu dengan harga paling besar dan juga lebih menekan biaya pengeluaran.

Tabel 2. Hasil Penerimaan Pelaku Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-Donri

Pola Pemanenan	Pelaku Pemanenan	Penerimaan (Rp/m ³)
Pengusaha Membeli Kayu per Sortimen	Pemilik Lahan	570.200
	Penebang	100.000
	Penyarad	150.000
	Pengangkut	75.000
	Pengusaha	2.198.250
Pengusaha Membeli Kayu per Pohon	Pemilik Lahan	411.396
	Penebang	87.500
	Penyarad	125.505
	Pengangkut	100.000
	Pengusaha	2.162.576
Pengusaha sebagai Pedagang Pengumpul	Pemilik Lahan	1.500.000
	Penebang	166.250

Penyarad	118.750
Pengangkut	50.000
Pengusaha	2.300.000

3. Pendapatan

Pendapatan bersih atau keuntungan pada pemanenan kayu hutan rakyat merupakan hasil penjualan kayu dikurangi biaya produksi. Menurut Soekartawi (1991), pendapatan adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan

dengan penerimaan yang diperoleh. Selisih antara hasil penjualan kayu dengan biaya produksi pada ketiga pengusaha dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Total Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan Bersih dari Tiga Pengusaha Kayu di Kecamatan Donri-Donri

Pola	Volume kayu (m ³)	Penerimaan (Rp/m ³)	Pengeluaran (Rp/m ³)			Pendapatan Bersih (Rp/m ³)
			Pembelian kayu	Biaya Produksi	Total Biaya	
Pengusaha Membeli per Sortimen	200,00	2.198.250	570.200	602.175	1.172.375	972.625
Pengusaha Membeli per Pohon	153,38	2.162.576	411.396	411.396	876.648	1.285.928
Pengusaha sebagai Pedagang Pengumpul	8,00	2.300.000	1.500.000	50.000	1.550.000	750.000
Total	161,38	6.660.826	2.481.596	1.063.571	3.599.023	3.008.553
Rata-rata	53,79	2.220.275	827.198	354.523	1.199.674	1.002.851

4. Hubungan Produksi dalam Pemanenan Hutan Rakyat

Pada kegiatan pemanenan untuk pola pertama dan pola kedua pengusaha disebut eksploitatif karena jumlah pendapatan yang diterima jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh pekerja, berbeda dengan pola ketiga dimana sifat hubungan produksi yang terjadi adalah non eksploitatif karena penghasilan yang diterima antara pemilik lahan dengan pengusaha tidak jauh berbeda. Menurut Suwanto dalam Sumule (2011) bagi para pekerja, upah merupakan sumber

pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan seseorang bekerja, maka melalui peningkatan upah kesejahteraan seseorang dapat ditingkatkan. Sebab apabila upah semakin besar, maka makin besar pula peluang seseorang untuk dapat memenuhi dan memperbaiki tingkat hidupnya, seperti pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sementara itu bagi pengusaha, upah merupakan biaya produksinya. Oleh karenanya, setiap terjadi peningkatan upah maka akan terjadi peningkatan biaya. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang pekerja maka dapat dikatakan

bahwa bersifat eksploitatif, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang pengusaha maka tidak selamanya dikatakan bersifat eksploitatif.

Tabel 4. Data Hubungan Produksi Pola Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-Donri

Pola	Penerimaan Pelaku Pemanenan Hutan (Rp/m ³)		Hubungan Produksi			Cara Hubungan Produksi
			Sifat Hubungan Produksi	Struktur Hubungan Produksi	Batas Sosial Hubungan Produksi	
Pengusaha Membeli Kayu per Sortimen	Pengusaha (935.675)	Penebang (100.000)	Eksploitatif	Pseudo Hirarkis	Keluarga Luas	Komersialis
		Penyarad (150.000)	Eksploitatif	Pseudo Hirarkis	Keluarga Luas	
		Pengangkut (75.000)	Eksploitatif	Pseudo Hirarkis	Keluarga Luas	
Pengusaha Membeli Kayu per Pohon	Pengusaha (1.285.928)	Penebang (87.500)	Eksploitatif	Hirarkis	Non Keluarga	Kapitalis
		Penyarad (125.505)	Eksploitatif	Hirarkis	Non Keluarga	
		Pengangkut (100.000)	Eksploitatif	Hirarkis	Non Keluarga	
Pengusaha sebagai Pedagang Pengumpul	Pemilik Lahan (979.375)	Penebang (166.250)	Eksploitatif	Non Hirarkis	Keluarga inti	Subsistensi
		Penyarad (118.750)	Eksploitatif	Non Hirarkis	Keluarga inti	
		Pengangkut (50.000)	Eksploitatif	Non Hirarkis	Keluarga inti	

Berdasarkan studi Sitorus (1999), cara produksi terdiri dari tiga, masing-masing: (a) cara produksi subsistensi, yakni usaha pertanian pangan dengan hubungan produksi terbatas pada keluarga inti dengan sifat hubungan yang egaliter, (b) cara produksi komersialis, yakni usaha yang sudah berorientasi pasar dengan hubungan produksi menunjuk pada gejala eksploitasi surplus melalui ikatan kekerabatan, dan hubungan sosial antara pekerja bersifat egaliter tetapi kompetitif, dan (c) cara produksi kapitalis yaitu usaha padat modal berorientasi pasar dimana hubungan produksi mencakup struktur majikan buruh atau pemilik modal-pemilik tenaga

Data hubungan produksi yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pola pertama, cara produksi yang digunakan adalah cara produksi komersialis dimana

hubungan produksinya menunjuk pada gejala eksploitasi surplus melalui ikatan

kekerabatan (keluarga luas). Pola kedua dapat disimpulkan bahwa cara produksinya bersifat kapitalis (*capitalist production*) dimana hubungan produksi mencakup struktur majikan-buruh (*hirarkis*) dan bersifat mengeksploitasi karena pendapatan yang diperoleh pengusaha jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh buruh. Sedangkan pola ketiga merupakan cara produksi subsistensi dimana hubungan produksinya terbatas pada keluarga inti dan bersifat egaliter.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendapatan dan hubungan produksi pemanenan kayu hutan rakyat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pemanenan kayu hutan rakyat yang terjadi pada kegiatan pemanenan di Kecamatan Donri-Donri adalah : pengusaha membeli kayu per sortimen dan per pohon kepada pemilik lahan hutan rakyat, serta pengusaha sebagai pedagang pengumpul.
2. Pendapatan bersih terbesar diterima oleh pengusaha yaitu dengan membeli kayu per pohon kemudian berturut-turut pengusaha yang membeli kayu per sortimen dan pengusaha sebagai pedagang pengumpul. Berbanding terbalik dengan pemilik lahan, pendapatan bersih diterima oleh pemilik lahan pada pola ketiga.
3. Berdasarkan sifat, batas sosial hubungan produksi dan dari segi aspek pendapatan yang diterima, maka hubungan produksi yang terjadi pada kegiatan pemanenan hutan rakyat adalah pola pertama struktur hubungan produksinya pseudo hirarkis, bersifat eksploitatif dan batas sosial hubungan produksinya adalah keluarga luas. Pola kedua berstruktur hirarkis dimana batas sosialnya non keluarga dan bersifat eksploitatif. Sedangkan pola ketiga berstruktur non hirarkis dimana batas sosialnya merupakan keluarga inti dan bersifat non hirarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, I. 2002. *Pengantar Ekonomi-Politik*. <http://www.geocities.com> {12 Februari, 2013}.
- Sitorus, M.T.F. 1999. *Pembentukan Golongan Pengusaha Lokal di Indonesia : Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soekartawi. 1991. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sumule, F. 2011. *Sistem Upah dan Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Jati Rakyat di Desa Mattampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suseno, F. M. 1999. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisi*. Gramedia. Jakarta.